KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : Waktu terbatas, prioritaskan pembahasan RUU Krusial
Tanggal : Rabu, 24 Maret 2021
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

Waktu Terbatas, Prioritaskan Pembahasan RUU Krusial

DPR akhirnya menyepakati 33 RUU masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021. Dengan sisa waktu yang amat pendek, DPR harus fokus pada RUU krusial yang bersangkutan langsung dengan publik.

JAKARTA, KOMPAS — Program Legislasi Nasional Prioritas 2021 yang berisi 33 rancangan undang-undang akhirnya disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (23/3/2021). Karena sisa waktu 9 bulan bisa lebih sempit akibat reses, DPR dan pemerintah diharapkan membahas RUU yang krusial dan bersentuhan langsung dengan publik. Misalnya, RUU Pengawasan Obat dan Makanan, RUU Wabah, RUU Daerah Kepulauan, RUU Perlindungan Data Pribadi, dan RUU Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Supratman Andi Agtas, saat rapat paripurna, di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, mengatakan, dalam penyusunan Prolegnas Prioritas 2021, Baleg DPR menerima 61 usulan RUU, terdiri dari 42 RUU usulan komisi, fraksi, anggota DPR, dan masyarakat; serta 13 RUU usulan pemerintah dan 6 RUU usulan DPD.

Ia menjelaskan, ada lima parameter yang disepakati antara Baleg, Kementerian Hukum dan HAM, serta DPD untuk RUU yang masuk ke Prolegnas 2021. Parameternya, RUU tahap pembicaraan tingkat satu, RUU yang menunggu surat presiden, RUU yang telah menjalani pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsinya di Baleg DPR, serta RUU dalam penyusunan yang naskah akademik dan draf RUU-nya tersedia. Juga RUU usulan baru Prolegnas 2020-2024 yang memenuhi urgensi tertentu.

Sejauh ini, total ada 33 RUU di Prolegnas 2021 yang disepakati saat pengambilan keputusan tingkat pertama antara Baleg DPR dan Kemenkumham, 9 Maret lalu. Sebanyak 33 RUU terdiri dari 21 RUU diusulkan DPR dengan catatan dua di antaranya bersama pemerintah, 10 RUU usulan pemerintah, dan 2 RUU DPD.

Dalam rapat bersama antara Kemenkumham dan Baleg DPR, RUU Pemilihan Umum ditarik dari daftar Prolegnas 2021 dan diganti RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, usulan pemerintah.



KOMPAS/HENDRA A SETYAWAN

Layar monitor menunjukkan anggota Dewan yang mengikuti Rapat Paripurna DPR secara daring ditampilkan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/3/2021). Rapat paripurna itu untuk mendengarkan dan mengambil keputusan tentang laporan Badan Legislasi DPR mengenai penetapan Prolegnas Prioritas 2021.

Memilah dan memilih

Di sela-sela rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, kemarin, sejumlah fraksi menyampaikan interupsi karena tidak ada agenda pembacaan sikap setiap fraksi seusai pengesahan Prolegnas 2021.

Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR Marwan Cik Asan berpandangan, di tengah pandemi Covid-19 dan keterbatasan waktu yang sekitar 7 bulan, seyogianya DPR dan pemerintah bisa lebih memilah dan memilih RUU prioritas. "Kami harap kita dapat lebih memilih dan memilah karena tak mungkin 33 RUU itu bisa rampung tahun ini," tutur Marwan.

Fraksi Demokrat, lanjut Marwan, mendukung penuh semua RUU yang bersentuhan dengan kebutuhan rakyat, misalnya RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan, dan mengkritik pencabutan RUU Pemilu. Ia mengajak semua pihak belajar dari penyelenggaraan Pemilu 2019 yang menghadirkan sejumlah masalah akibat kontestasi serentak.

Interupsi juga disampaikan Sekretaris Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Ledia Hanifa Amaliah. Sejalan dengan Marwan, fraksinya menilai RUU Pemilu penting dibahas demi perbaikan sistem pemilu dan sistem pemilihan kepala daerah.

Selain itu, Fraksi PKS juga meminta agar RUU tentang Ibu Kota Negara tak dibahas. Sebab, saat ini pandemi Covid-19 masih melanda. "Sebaiknya ditarik pemerintah agar kita bisa lebih fokus pada pembahasan RUU penyelesaian urusan publik," ucapnya.

Terkait penetapan RUU prioritas Prolegnas 2021, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan hal itu tak lepas dari penyerapan aspirasi publik. Keinginan publik dipertimbangkan dan dikaji pro dan kontranya sebelum masuk Prolegnas 2021. Salah satunya, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) yang masuk Prolegnas 2021.

"Ini memperlihatkan betapa DPR juga menyerap aspirasi kelompok sipil perempuan yang ingin mendapat perlindungan negara dari kejahatan kekerasan seksual," kata Puan, seusai rapat. Sebagaimana diketahui, RUU PKS diusulkan Komnas Perempuan sejak 2012 dan baru masuk pada 2021.

Kualitas legislasi

Direktur Indonesia Parlementary Center Ahmad Hanafi menuturkan, tahun ini DPR memiliki waktu terbatas untuk membahas legislasi, belum lagi jika dikurangi reses DPR.

Dengan waktu yang sangat terbatas, tambah Hanafi, peningkatan produktivitas DPR dalam legislasi sulit diharapkan. Karena itu, yang terpenting saat ini adalah peningkatan kualitas legislasi dengan proses pembahasan lebih demokratis. "Jangan sampai dua-duanya enggak didapat, produktivitas tidak meningkat, hasilnya tidak berkualitas," tuturnya.

Untuk sampai pada proses pembahasan yang lebih demokratis, ruang keterlibatan publik harus dibuka luas. Setiap aspirasi publik dalam masa reses pun harus diperjuangkan. "Jadikan korelasi reses dengan agenda legislasi saat pembahasan," kata Hanafi. (BOW)